



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul	: Bara di Ukraina Dian Wirengjurit (analisis geopolitik dan hubungan internasional)
Tanggal	: Selasa, 08 Februari 2022
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 7

Bara di Ukraina
Dian Wirengjurit
(analisis geopolitik dan hubungan internasional)

Pengerahan pasukan dan peralatan militer Rusia secara besar-besaran ke perbatasan Ukraina, secara geopolitis, tak bisa dipandang remeh. Krisis yang terjadi, apalagi jika meletus menjadi perang, bukan hanya urusan di antara kedua negara itu karena pasti berdampak serius dan memiliki ramifikasi luas. Yang dikhawatirkan, perkembangan yang tidak terkontrol akan membawa implikasi terhadap keamanan internasional, termasuk di kawasan Asia Tenggara.

Setelah Perang Dingin berakhir pada 1991 dengan bubaranya Uni Soviet, peta Eropa bagian timur telah berubah sangat signifikan. Posisi negara-negara eks Uni Soviet dan satelitnya (Ukraina dan Belarus) menjadi amat strategis, baik bagi Rusia maupun Amerika Serikat (AS) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Sejak tahun 2000, Presiden Vladimir Putin telah berusaha keras dan sistematis untuk membalikkan (reverse) situasi yang tercipta 30 tahun lalu. Indikasinya, AS dan NATO mulai menempatkan penasihat militernya di negara-negara Baltik, seperti Latvia dan Estonia.

Sementara Rusia pada tahun 2014 menganeksasi Semenanjung Krimea, diikuti dengan mendukung kelompok pro-Rusia di Provinsi Donetsk dan Luhansk (kawasan Donbas) di timur Ukraina.

Perang Dingin baru

Lepas dari kontroversi mengenai Perang Dingin baru, indikasi saat ini memperlihatkan pola yang sama dengan yang sebelumnya (1949-1991) yang berakhir dengan "kekalahan" Uni Soviet.

Pertama, di masa lalu, untuk

menahan ancaman AS dan NATO, Uni Soviet menjadikan negara-negara Pakta Warsawa (Albania, Polandia, Cekoslowakia, Hongaria, Bulgaria, Romania, dan Jerman Timur) sebagai zona penyangga. Saat ini semua negara eks Uni Soviet (plus Slovakia, dan Jerman Timur yang menjadi Jerman) telah menjadi anggota NATO.

Kedua, Rusia mendapatkan semacam berkah terselubung (*blessing in disguise*) karena negara-negara pecahan Uni Soviet itu kemudian menjadi semacam zona penyangga baru di perbatasannya.

Oleh karena itu, negara-negara itu segera "dirangkul" dalam Commonwealth of Independent States/CIS (1991); dan dalam Collective Security Treaty Organization/CSTO (1992)—beranggotakan Rusia, Armenia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Belarus, dan Georgia—yang tidak membolehkan anggotanya bergabung dalam aliansi militer lain.

Lebih luas, bersama China, Rusia membentuk Shanghai Cooperation Organization/SCO (1996) beranggotakan lima negara (China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan), yang kini menjangkau negara-negara Asia Selatan (India, Pakistan, dan Uzbekistan) dan terakhir Iran (2021). Selain itu, ada pula negara pengamat atau observer (Belarus dan Mongolia) dan mitra dialog Armenia, Azerbaijan, Kamboja, Nepal, dan Sri Lanka, serta Turki, yang notabene anggota NATO.

Karena itu, Edward Lucas dalam bukunya, *The New Cold War* (2009), mengatakan "uneasy confrontation between the West and the Kremlin" (konfrontasi pelik antara Barat dan Kremlin) sebagai Perang Dingin baru, ditandai dengan "the return to the Soviet-era methods" (kembalinya cara-cara era Soviet).

Dalam hal ini Rusia telah terprovokasi dan NATO telah "mengusik" (meddling) di halaman belakang Rusia (Russian backyard); dan terlihat dalam kebijakan AS di Kosovo dan aksi Rusia di Georgia. Inilah yang disebut Lucas sebagai "tit for tat", di mana NATO menggempur Serbia

(sekutu Rusia) dan mendukung berdirinya Kosovo; sementara Rusia menyerang Georgia (kawan NATO) dan mendukung pemisahan Abkhasia dan Ossetia.

Bahkan, dalam buku yang sama, sudah sejak 1998, Jenderal L. Ivashov, Presiden Academy for Geopolitical Problems, menyatakan bahwa Perang Dingin baru di Eropa tak terhindarkan jika NATO menempuh langkah keras (baca: militer) tanpa dukungan PBB, atau apabila mereka menempatkan diri sebagai "European policemen" (polisi Eropa).

Sementara Giorgi Arbatov, Direktur Think-tank ISKRAN, berpandangan bahwa Perang Dingin baru ini disebabkan sikap "masa bodoh" (indifference) NATO terhadap kepentingan Rusia dan agresivitasnya membawa pengaruh buruk terhadap hubungan Rusia dan Barat.

Perkembangan NATO

Sejak berakhirnya Perang Dingin 1991, keanggotaan NATO (didirikan 1949) telah berkembang pesat dari 16 menjadi 30 negara, dengan tujuh dari delapan negara Pakta Warsawa (didirikan 1955) kini telah menjadi anggota NATO, yaitu Ceko, Hongaria, Polandia, Bulgaria, Romania, Albania, dan Jerman Timur (yang bergabung dengan Jerman Barat). Sementara NATO sendiri sejak bubaranya "negri tirai besi" ini telah memperlakukan kebijakan pintu terbuka terhadap bekas negara-negara pecahannya.

Hasil KTT NATO 1994 di Brussel menegaskan "menghargakan dan menyambut baik ekspansi NATO yang akan menjangkau negara-negara demokratis di Timur". Bahkan pada 1998 pakta pertahanan ini menyepakati sebuah membership action plan (MAP) untuk membantu negara-negara yang berminat untuk bergabung. Saatini Bosnia-Herzegovina, Georgia, dan Ukraina diberitakan berminat bergabung dengan aliansi militer ini.

Sesuai isi Piagam NATO

(Washington Treaty, 1949), terutama Pasal 5, prinsip pertahanan kolektif merupakan inti dari pembentukan NATO, yang mengikat anggotanya dan menekankan solidaritas untuk melindungi satu sama lain.

Berdasarkan prinsip ini, NATO telah mengambil langkah-langkah pertahanan kolektif

tif pada berbagai kesempatan, misalnya dalam menanggapi perang di Suriah (yang berbatasan dengan Turki) dan mengantisipasi krisis Rusia-Ukraina. Memang diakui Ukraina memiliki aspirasi untuk bergabung dengan aliansi pimpinan AS ini. Itulah sebabnya, sekitar 150 penasihat militer AS sudah berada di tempat pelatihan Lviv, di barat negara itu, yang jauh dari garis depan. Dalam kelompok ini termasuk pasukan khusus (Green Beret), serta pelatih Garda Nasional dari satuan tempur Brigade Infanteri Ke-53 Florida. Selain itu, penasihat militer dari sejumlah negara sekutu juga berada di Ukraina, termasuk Inggris, Kanada, Lituania, dan Polandia (New York Times, 23/1/2022). Masuknya Ukraina ke dalam organisasi ini akan menjadikannya sebagai negara NATO terbesar dan terpenting yang berbatasan langsung dengan Rusia setelah Estonia dan Latvia.

Ukraina juga akan menggantikan posisi Turki yang tidak lagi menjadi anggota NATO yang terdepan karena "terhalang" oleh Georgia yang sejak perang 2008 "dikuasai" Rusia dan Azerbaijan yang "netral". Kecurigaan Rusia terhadap motivasi NATO untuk "menarik" anggota baru dari Eropa Timur, menurut Prof JL Black dalam bukunya yang berjudul Russia Faces NATO Expansion (2000), sudah merupakan tradisi sejarah yang panjang. Federasi Rusia mewarisi segalanya dari Uni Soviet, kecuali integritas teritorial, perbatasan yang aman, dan perasaan sebagai kekuatan yang tak terkalahkan (impregnable).

Wilayah penyangga besar yang diperoleh dengan kekuatan senjata oleh St Petersburg dan Moskwa selama periode 150 tahun (sejak Perang Dunia I) hilang dalam sekejap. Oleh karena itu, prospek perluasan NATO ke Timur tidak akan pernah dapat diterima oleh Rusia, dan merupakan ancaman terhadap keamanan nasionalnya. "Leverage" Rusia

Namun, Rusia memiliki beberapa kelebihan (leverage). Kelebihan itu ialah, pertama,

Ukraina sangat bergantung pada Rusia dalam suplai gas dan jaringan pipa melalui negara ini juga digunakan untuk menyuplai gas ke sejumlah negara NATO, seperti Polandia, Slowakia, Hongaria, dan Romania.

Kedua, sekitar 50 persen penduduk Ukraina di bagian timur berdarah atau berbahasa Rusia.

Ketiga, secara de facto Ukraina juga sudah "terkepung" dari tiga arah, yaitu dari Moskwa (utara), kawasan Donbas (timur), dan Semenanjung Crimea (selatan).

Keempat, adanya jaringan pipa Nord Stream-2 yang menghubungkan suplai gas Rusia langsung ke Jerman, yang dapat mengurangi soliditas NATO.

Presiden Putin sudah menegaskan posisi dasarnya (bottom line) ingin menghentikan Ukraina bergabung dengan NATO dan mendapatkan jaminan bahwa AS dan aliansi itu tidak akan pernah menempatkan senjata ofensif di negara tersebut, yang mengancam keamanan Rusia. Putin juga berharap dapat memulihkan pengaruhnya di kawasan itu, sesuai peta strategis Eropa yang belum diubah pada 1990-an.

Hal yang sama terlihat ketika Rusia mengirimkan pasukan koalisi CSTO untuk menyelesaikan pergolakan yang terjadi di Kazakhstan awal Januari lalu. Menurut John Daniszewski, analis senior AP, bagi Rusia apa yang terjadi di Ukraina merefleksikan semangat Perang Dingin dan munculnya kembali harapan yang berasal dari Konferensi Yalta 1945 bahwa "the West should respect a Russian sphere of influence in Central and Eastern Europe" (Barat harus menghormati lingkup pengaruh Rusia di Eropa Tengah dan Eropa Timur) (AP, 25/1/2022).

Hingga kini Kremlin menyakal akan menyerang Ukraina, sementara Presiden AS Joe Biden menegaskan akan mengedepankan diplomasi, yang diimbangi dengan sanksi. Hal senada disampaikan Sekjen NATO Jens Stoltenberg; "We have a wide range of options: economic sanctions, financial sanctions, political restrictions." (Kita memiliki banyak opsi: sanksi ekonomi, sanksi finansial, restriksi politik) (CNN, 22/1/2022), dan menegaskan bahwa Rusia akan menanggung biaya yang mahal apabila menyerang Ukraina.

Bagi Kremlin, jika AS dan

NATO tidak mengubah sikapnya di Ukraina, Menlu Rusia Sergey Lavrov telah memperingatkan bahwa Moskwa memiliki "hak untuk memilih cara untuk memastikan kepentingan keamanannya yang sah" (ABC7, 26/1/2022).

Perang kata-kata memang sering terjadi di antara pemimpin kedua negara adidaya ini. Masalahnya, "gaung" krisis ini sudah dirasakan di kawasan lain. AS sudah melibatkan NATO (serta Jepang dan Australia) dalam latihan militer di Laut China Selatan (LCS), untuk menunjukkan kesiapannya kepada China dan Rusia, dalam menghadapi tantangan di Laut Hitam, Mediterania, LCS, dan China timur (Global Times, 5/8/2021).

Sementara negara-negara SCO (Rusia, China, dan Iran) sudah menggelar latihan militer di Timur Tengah, yang jauh dari Eropa. Terakhir diberitakan bahwa Presiden Putin telah melepon pemimpin-pemimpin Venezuela, Nikaragua, dan Kuba (New York Times, 24/1/2022) untuk membicarakan "a 'military-technical' response to the Ukraine crisis".

Artinya, insiden militer kecil sekalipun dapat menyebabkan bara di Ukraina menyala dan masyarakat internasional akan terkena getahnya. Nah!